



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PATRISIUS TUPEN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 111360

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.075.000.000**

1. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 4.000 m2 di KAB / KOTA TIMOR TENGAH UTARA,
HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/180 m2 di KAB / KOTA
TIMOR TENGAH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA LEMBATA, WARISAN Rp.
130.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **275.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI TRUK TANGKI Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000
3. MOBIL, KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
4. MOTOR, YAMAHA X RAIDER MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 18.000.000



5. MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 15.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 71.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 672.626.382

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.094.426.382

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.094.426.382

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.